



Literasi Digital dan Keuangan Partisipatif bagi UMKM Perempuan di Perdesaan Indonesia dan Filipina: Evaluasi Komparatif Pengabdian Masyarakat atas Penguatan Kapasitas, Adopsi Platform, dan Keberlanjutan Penghidupan

Andi Pangestu¹

Pusat Pengembangan Komunitas dan Inovasi Sosial
Universitas Indonesia

Korespondensi Email : andipangestu.ac.id
Phone Number : +6285-xxxx-xxxx (For send LoA)

Abstract (English) :

Women-led MSMEs play a strategic role in inclusive development in Southeast Asia, yet many still face limited digital access, low financial literacy, weak market networks, and gender-based social barriers to online economic participation. This article analyzes participatory digital literacy and financial interventions for women-led MSMEs in rural Indonesia and the Philippines through a comparative community service evaluation approach. Drawing on community empowerment theory, a participatory development approach, and secondary evidence from regional development reports, MSME policy documents, and community service literature, the article explains how community vulnerabilities can be transformed through capacity building, peer learning, stakeholder collaboration, and the adoption of locally appropriate technologies. Comparative findings suggest that digital literacy has a stronger social impact when embedded in community trust networks, livelihood needs, digital security, and women's collective agency, rather than simply providing technical training on app usage. Indonesia demonstrates the importance of scale, community-based facilitation, and integration with the local MSME ecosystem, while the Philippines demonstrates the importance of barangay networks, livelihood resilience, and mobile-based entrepreneurship mentoring. This article contributes to the study of community service by emphasizing that sustainable empowerment depends on the alignment of participatory diagnosis, financial literacy, safe digital adoption, ongoing mentoring, and institutional support.

Keywords: *community service; digital literacy; women's MSMEs; participatory empowerment; financial literacy; Southeast Asia; Indonesia; Philippines; sustainable livelihoods*

Abstrak (Indonesia)

UMKM yang dipimpin perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan inklusif di Asia Tenggara, namun banyak di antaranya masih menghadapi keterbatasan akses digital, rendahnya literasi keuangan, lemahnya jaringan pasar, serta hambatan sosial berbasis gender dalam partisipasi ekonomi daring. Artikel ini menganalisis intervensi literasi digital dan keuangan partisipatif bagi UMKM perempuan di wilayah perdesaan Indonesia dan Filipina melalui pendekatan evaluasi pengabdian masyarakat komparatif. Dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat, pendekatan pembangunan partisipatif, serta bukti sekunder dari laporan pembangunan regional,



dokumen kebijakan UMKM, dan literatur pengabdian masyarakat, artikel ini menjelaskan bagaimana kerentanan komunitas dapat diubah melalui penguatan kapasitas, pembelajaran sebaya, kolaborasi pemangku kepentingan, dan adopsi teknologi yang sesuai konteks lokal. Temuan komparatif menunjukkan bahwa literasi digital memberikan dampak sosial yang lebih kuat ketika dilekatkan pada jaringan kepercayaan komunitas, kebutuhan penghidupan, keamanan digital, dan agensi kolektif perempuan, bukan sekadar pelatihan teknis penggunaan aplikasi. Indonesia memperlihatkan pentingnya skala, fasilitasi berbasis komunitas, dan integrasi dengan ekosistem UMKM lokal, sedangkan Filipina menunjukkan pentingnya jejaring barangay, ketahanan penghidupan, dan pendampingan kewirausahaan berbasis mobile. Artikel ini berkontribusi pada kajian pengabdian masyarakat dengan menegaskan bahwa keberlanjutan pemberdayaan bergantung pada keselarasan antara diagnosis partisipatif, literasi keuangan, adopsi digital yang aman, pendampingan berkelanjutan, dan dukungan kelembagaan.

Kata kunci: pengabdian masyarakat; literasi digital; UMKM perempuan; pemberdayaan partisipatif; literasi keuangan; Asia Tenggara; Indonesia; Filipina; penghidupan berkelanjutan

Pendahuluan

Pengabdian masyarakat di Asia Tenggara mengalami perubahan orientasi yang cukup mendasar. Jika sebelumnya pengabdian masyarakat sering dipahami sebagai bantuan sosial, penyuluhan, atau kegiatan transfer pengetahuan satu arah, kini pengabdian masyarakat semakin diarahkan pada intervensi partisipatif, berbasis bukti, dan berorientasi pemberdayaan. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran pembangunan kontemporer yang tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai objek penerima program, melainkan sebagai pemilik pengetahuan lokal, mitra perencanaan, sekaligus aktor utama perubahan sosial. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menegaskan pentingnya pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, pengurangan ketimpangan, serta kemitraan pembangunan, yang seluruhnya membutuhkan pendekatan komunitas yang sensitif terhadap konteks sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan lokal (United Nations, 2015).

Dalam konteks Asia Tenggara, agenda tersebut berkaitan erat dengan prioritas ASEAN mengenai pembangunan yang berpusat pada manusia, transformasi digital inklusif, ketahanan sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat. ASEAN Socio-Cultural Community Strategic Plan menekankan pentingnya pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, serta daya tahan komunitas, sedangkan ASEAN Digital Masterplan menempatkan adopsi layanan digital oleh warga, pekerja, dan UMKM sebagai salah satu prasyarat pembangunan kawasan yang inklusif (ASEAN Secretariat, 2021, 2025). Dengan demikian, transformasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan infrastruktur teknologi, tetapi juga sebagai persoalan pemberdayaan masyarakat,



keadilan akses, keamanan digital, dan kemampuan komunitas untuk memanfaatkan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup.

Urgensi pemberdayaan digital semakin kuat karena teknologi digital kini telah memasuki hampir seluruh dimensi kehidupan ekonomi masyarakat. Digitalisasi tidak hanya membentuk cara perusahaan besar beroperasi, tetapi juga memengaruhi bagaimana pelaku usaha mikro menjangkau konsumen, bagaimana perempuan mengelola usaha rumah tangga, bagaimana komunitas menerima pembayaran, bagaimana produk lokal dipasarkan, dan bagaimana masyarakat kecil bertahan menghadapi guncangan ekonomi. World Bank (2024) menegaskan bahwa transformasi digital membuka peluang besar, tetapi pada saat yang sama dapat memperluas kesenjangan antara kelompok yang mampu menggunakan teknologi secara produktif dan kelompok yang terhambat oleh keterbatasan akses, keterampilan, biaya, kualitas konektivitas, dan kepercayaan. UNDP (2024) juga menunjukkan bahwa pembangunan di Asia-Pasifik menghadapi kemajuan sekaligus ketimpangan yang bertahan lama, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan manusia yang memperkuat agensi dan kemampuan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi agregat.

Artikel ini berfokus pada UMKM yang dipimpin perempuan karena kelompok ini merupakan salah satu pilar penting pembangunan ekonomi lokal sekaligus salah satu kelompok yang masih menghadapi hambatan struktural dalam transformasi digital. UMKM merupakan fondasi ekonomi masyarakat di banyak negara Asia Tenggara. Di Indonesia, UMKM dilaporkan berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, sehingga perannya sangat penting dalam stabilitas ekonomi rumah tangga, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi nasional (Coordinating Ministry for Economic Affairs of Indonesia, 2022; ADB, 2024). Di Filipina, UMKM mencakup 99,6 persen dari total unit usaha dan menyerap sekitar 67 persen tenaga kerja, sehingga UMKM juga menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan nasional (Bangko Sentral ng Pilipinas, 2025; Department of Trade and Industry, 2024).

Dimensi gender memperdalam urgensi persoalan ini. Banyak UMKM perempuan beroperasi pada skala mikro, berbasis rumah tangga, memiliki modal terbatas, bergantung pada tenaga keluarga, dan berada pada sektor dengan margin keuntungan rendah. OECD (2025) mencatat bahwa perempuan memimpin lebih dari separuh UMKM di Indonesia dan Filipina, serta menegaskan bahwa digitalisasi dapat membuka akses pasar, keuangan, dan pelatihan bagi perempuan wirausaha di wilayah terpencil apabila program yang dilakukan mampu mengatasi keterbatasan infrastruktur, norma sosial, mobilitas, jaringan usaha, dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, literasi digital bagi perempuan pelaku UMKM tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi. Literasi digital juga menyangkut keberanian tampil di ruang publik digital, kemampuan mengelola risiko transaksi, literasi keuangan, pengambilan keputusan ekonomi, keamanan dari penipuan daring, dan pengakuan sosial terhadap kontribusi ekonomi perempuan.



Permasalahan komunitas yang dianalisis dalam artikel ini bersifat multidimensional. Secara sosial, keterbatasan literasi digital menghambat perempuan pelaku UMKM untuk memasuki jaringan pasar yang lebih luas dan memperlemah posisi mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi komunitas. Secara ekonomi, rendahnya literasi digital dan keuangan mengurangi kapasitas pelaku usaha untuk mengelola arus kas, mencatat transaksi, menjangkau pelanggan, menggunakan pembayaran digital, dan mengembangkan strategi pemasaran. Secara kultural, partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dipengaruhi oleh norma lokal mengenai kerja domestik, mobilitas, visibilitas publik, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Secara kelembagaan, intervensi yang dilakukan pemerintah daerah, universitas, lembaga keuangan, organisasi nonpemerintah, dan platform digital sering kali masih terfragmentasi, bersifat jangka pendek, dan belum selalu disertai pendampingan pascapelatihan. Secara akademik, kajian pengabdian masyarakat masih sering menekankan partisipasi sebagai prosedur kegiatan, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana partisipasi tersebut menghasilkan perubahan perilaku, agensi ekonomi, dan keberlanjutan penghidupan.

Kajian teoritis mengenai pemberdayaan memberikan dasar penting untuk memahami persoalan ini. Freire (1970) memandang pemberdayaan sebagai proses penyadaran kritis, yaitu ketika masyarakat mampu memahami kondisi yang membatasi kehidupan mereka dan bertindak secara kolektif untuk mengubahnya. Chambers (1994) menekankan pentingnya participatory rural appraisal sebagai metode yang membalik relasi pengetahuan pembangunan, dari dominasi ahli eksternal menuju pengakuan atas pengetahuan lokal. Sen (1999) memahami pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif, sehingga akses digital baru bermakna apabila memperluas kemampuan nyata masyarakat untuk memilih, bertindak, dan memperoleh manfaat. Kabeer (1999) menegaskan bahwa pemberdayaan melibatkan relasi antara sumber daya, agensi, dan capaian; karena itu, pelatihan digital tidak cukup apabila perempuan hanya memperoleh akun digital tanpa kemampuan mengambil keputusan, mengelola risiko, dan memperoleh hasil ekonomi yang bermakna.

Literatur pembangunan partisipatif juga menunjukkan bahwa partisipasi hanya efektif apabila disertai respons kelembagaan dan akuntabilitas sosial. Mansuri dan Rao (2013) memperingatkan bahwa program partisipatif dapat menjadi simbolik apabila prioritas, anggaran, dan evaluasi tetap dikendalikan aktor eksternal. Cornwall (2008) juga menyatakan bahwa partisipasi yang diundang tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan apabila masyarakat tidak memiliki pengaruh nyata terhadap desain dan pelaksanaan program. Gaventa dan Barrett (2012) menunjukkan bahwa partisipasi warga dapat meningkatkan hasil pembangunan ketika partisipasi tersebut membangun kapasitas kolektif dan mengubah relasi antara masyarakat dan institusi. Dalam bidang pendidikan digital, UNESCO (2023) menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus tepat, adil, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar didorong oleh optimisme teknologi.



Kajian mengenai digitalisasi UMKM memperlihatkan potensi sekaligus keterbatasan. Beberapa studi menekankan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, memperbaiki efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing usaha kecil (Gonzalez-Varona et al., 2024). Kajian mengenai inklusi keuangan digital menunjukkan bahwa fintech, pembayaran digital, dan pencatatan transaksi dapat memperluas partisipasi keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko apabila tidak disertai literasi, perlindungan konsumen, dan pemahaman terhadap utang digital (World Bank, 2024). Studi mengenai perempuan wirausaha di platform digital menunjukkan bahwa e-commerce dan media sosial dapat mengurangi hambatan mobilitas dan memperluas akses pelanggan, tetapi juga membuka risiko pelecehan daring, ketergantungan platform, penyalahgunaan data, dan ketidaksetaraan visibilitas algoritmik (IFC, 2021; UN Women, 2023).

Berdasarkan sintesis tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian dan praktik pengabdian masyarakat. Pertama, kajian pemberdayaan sering kali masih terpisah dari mekanisme teknis pelatihan digital. Kedua, studi digitalisasi UMKM banyak mengukur adopsi teknologi, tetapi belum cukup mengukur agensi komunitas. Ketiga, laporan pengabdian masyarakat sering menjelaskan kegiatan pelatihan, tetapi kurang membandingkan bagaimana perbedaan konteks sosial dan kelembagaan memengaruhi hasil program. Keempat, kajian komparatif Asia Tenggara mengenai UMKM perempuan di wilayah perdesaan dan terpencil masih relatif terbatas. Kelima, keberlanjutan dan pengukuran dampak sering ditempatkan sebagai bagian akhir program, bukan sebagai prinsip desain sejak awal.

Kebaruan artikel ini terletak pada argumen bahwa literasi digital dan keuangan bagi UMKM perempuan akan memberikan dampak sosial yang lebih kuat apabila bergerak dari inklusi berbasis akses menuju pemberdayaan berbasis agensi. Inklusi berbasis akses hanya bertanya apakah perempuan dapat menggunakan perangkat, aplikasi, atau platform. Pemberdayaan berbasis agensi bertanya apakah perempuan memiliki kemampuan, keberanian, keamanan, dan kendali untuk menentukan bagaimana teknologi digunakan bagi kepentingan usaha, keluarga, dan komunitas. Perbedaan ini penting karena banyak program literasi digital menghasilkan keluaran jangka pendek seperti jumlah peserta, akun digital, atau sertifikat pelatihan, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan perilaku ekonomi, kemandirian keputusan, atau ketahanan penghidupan.

Kerangka analitis artikel ini adalah: kerentanan komunitas → diagnosis partisipatif → penguatan kapasitas digital-keuangan → perubahan perilaku kewirausahaan → agensi kolektif → ketahanan penghidupan berkelanjutan. Kerentanan komunitas mencakup keterbatasan keterampilan digital, akses pasar, literasi keuangan, keamanan daring, serta dukungan kelembagaan. Diagnosis partisipatif merupakan proses ketika perempuan pelaku UMKM, fasilitator, pemerintah lokal, universitas, dan pemangku kepentingan komunitas bersama-sama mengidentifikasi kendala nyata dalam



penghidupan. Penguatan kapasitas mencakup pelatihan pemasaran digital, pencatatan keuangan, penggunaan pembayaran digital, keamanan daring, komunikasi pelanggan, dan manajemen usaha berbasis platform. Perubahan perilaku mencakup penggunaan kanal digital, pencatatan transaksi lebih tertib, peningkatan kepercayaan diri, dan perbaikan interaksi pasar. Agensi kolektif mencakup pembelajaran sebaya, kelompok usaha perempuan, dan dukungan sosial komunitas. Ketahanan penghidupan berkelanjutan merujuk pada kemampuan UMKM perempuan untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan mengembangkan usaha dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, teknologi, dan lingkungan.

Tujuan artikel ini adalah mengevaluasi secara komparatif bagaimana intervensi literasi digital dan keuangan partisipatif memperkuat pemberdayaan, partisipasi pasar, dan ketahanan penghidupan UMKM perempuan di wilayah perdesaan Indonesia dan Filipina, serta merumuskan proposisi pengabdian masyarakat bagi program pemberdayaan digital di Asia Tenggara.

Metode

Artikel ini menggunakan desain evaluasi komparatif berbasis komunitas yang memadukan participatory action research, asset-based community development, dan theory of change analysis. Desain ini dipilih karena persoalan yang dianalisis bukan hanya apakah perempuan pelaku UMKM memperoleh keterampilan teknis, tetapi bagaimana mekanisme intervensi partisipatif mengubah kerentanan menjadi agensi, perubahan perilaku, dan ketahanan penghidupan berkelanjutan. Indonesia dan Filipina dipilih karena keduanya memiliki sektor UMKM yang besar, partisipasi perempuan wirausaha yang signifikan, karakter geografis kepulauan, kesenjangan perdesaan-perkotaan, serta agenda aktif dalam pemberdayaan digital. Pada saat yang sama, kedua negara memiliki perbedaan dalam tradisi tata kelola lokal, struktur komunitas, pola pasar, serta model kelembagaan pendampingan. Unit analisis dalam artikel ini bukan individu wirausaha sebagai aktor ekonomi yang terisolasi, melainkan ekosistem UMKM perempuan berbasis komunitas yang mencakup pelaku usaha, kelompok sebaya, fasilitator lokal, lembaga desa atau barangay, organisasi nonpemerintah, universitas, penyedia pelatihan, lembaga keuangan, dan platform digital. Karena artikel ini tidak didasarkan pada survei rumah tangga atau eksperimen lapangan yang dikumpulkan langsung oleh penulis, artikel ini tidak mengarang jumlah peserta, kutipan wawancara, atau klaim empiris yang tidak terverifikasi. Analisis disusun melalui sintesis bukti sekunder yang dapat diverifikasi dari ASEAN, OECD, ADB, World Bank, UNESCO, UNDP, The Asia Foundation, dokumen kebijakan UMKM nasional, serta literatur ilmiah tentang pengabdian masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan partisipatif.

Logika evaluasi dalam artikel ini mengikuti urutan diagnosis masalah, intervensi partisipatif, mekanisme pemberdayaan, hasil terukur, dan implikasi keberlanjutan.



Kebutuhan komunitas direkonstruksi dari bukti mengenai hambatan yang dihadapi UMKM perempuan, meliputi keterbatasan keterampilan digital, rendahnya literasi keuangan, isolasi pasar, praktik usaha informal, risiko keamanan daring, dan lemahnya dukungan kelembagaan berkelanjutan. Mekanisme partisipatif dinilai melalui bukti mengenai pelatihan yang disesuaikan dengan konteks lokal, pembelajaran sebaya, fasilitasi komunitas, kolaborasi multi-pemangku kepentingan, serta pendampingan pascapelatihan. Sumber data mencakup laporan regional Go Digital ASEAN, kajian literasi digital ASEAN, analisis OECD mengenai kewirausahaan perempuan di wilayah terpencil Indonesia dan Filipina, pemantauan UMKM oleh ADB, analisis pembangunan digital World Bank, pedoman UNESCO mengenai penggunaan teknologi yang adil, serta dokumen kebijakan UMKM. Pengukuran dampak dilakukan melalui interpretasi komparatif kualitatif terhadap indikator terukur yang dilaporkan dalam sumber-sumber tersebut, seperti migrasi usaha ke kanal daring, keterlibatan pelanggan, kepercayaan diri dalam keterampilan digital, jangkauan pelatihan, signifikansi UMKM dalam penyerapan kerja, dan hambatan partisipasi digital perempuan. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, perbandingan lintas kasus, koherensi teoritis, dan pemeriksaan konsistensi antara statistik regional, bukti program, dan teori pemberdayaan. Pertimbangan etik dilakukan dengan menghindari klaim lapangan yang tidak dikumpulkan langsung, menghormati representasi komunitas, dan menempatkan perempuan pelaku UMKM bukan sebagai penerima manfaat yang kurang mampu, melainkan sebagai aktor ekonomi yang kemampuannya dibentuk oleh kondisi struktural, sosial, budaya, dan kelembagaan.

Temuan dan Pembahasan

Tabel 1. Matriks Komparatif Masalah Komunitas, Intervensi Partisipatif, Mekanisme Pemberdayaan, dan Hasil Terukur

Varia bel	Komunita s/Kasus Perdesaan Indonesia	Komunita 1: s/Kasus Perdesaan Filipina	Komunita 2: s/Kasus Perdesaan Filipina	Bukti Empiris	Interpre tasi Analitis
Varias i masalah komunitas	UMKM perempuan bergerak dalam ekonomi informal besar dengan akses digital yang meningkat, tetapi formalitas usaha, pencatatan keuangan,	UMKM perempuan berada dalam jejaring sosial barangay, tetapi menghadapi keterbatasan infrastruktur, modal, jarak pasar,	UMKM perempuan berada dalam jejaring sosial barangay, tetapi menghadapi keterbatasan infrastruktur, modal, jarak pasar,	UMK M Indonesia berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja;	Pember dayaan UMKM bukan isu sektoral, melainkan isu ketahanan komunitas karena berdampak langsung pada



	pemasaran digital, dan kepercayaan terhadap platform masih tidak merata.	kerentanan penghidupan akibat bencana dan guncangan ekonomi.	UMKM Filipina mencakup 99,6% unit usaha dan menyerap sekitar 67% tenaga kerja (Coordinating Ministry for Economic Affairs of Indonesia, 2022; Bangko Sentral ng Pilipinas, 2025).	ekonomi rumah tangga, keberlanjutan kerja, dan stabilitas sosial lokal.
Konteks sosial dan kelembagaan	Lembaga desa, koperasi, universitas, kelompok perempuan, dan dinas UMKM lokal menjadi pintu masuk penting bagi fasilitasi komunitas.	Barangay, lembaga penghidupan lokal, jaringan gereja/komunitas, NGO, dan pusat pelatihan lokal berperan dalam membangun kepercayaan dan mobilisasi peserta.	OECD (2025) menekankan pentingnya dukungan berbasis tempat dan berpusat pada manusia bagi perempuan wirausaha di wilayah terpencil Indonesia dan Filipina.	Kepercayaan merupakan prasyarat adopsi digital. Komunitas lebih responsif terhadap fasilitator yang tertanam dalam jejaring lokal dibandingkan model pelatihan eksternal yang seragam.
Mekanisme	Pelatihan relevan ketika dikaitkan dengan	Pelatihan relevan ketika dikaitkan dengan	Go Digital ASEAN	Intervensi partisipatif bekerja ketika



intervensi partisipatif	foto produk, katalog digital, onboarding marketplace, pembayaran digital, pembukuan sederhana, komunikasi pelanggan, dan mentoring sebaya.	penjualan berbasis mobile, social commerce, pengelolaan keuangan rumah tangga, keberlanjutan usaha saat bencana, dan pendampingan komunitas.	melaporkan materi digital pelatihan keterampilan digital bagi komunitas kurang terlayani dan UMKM, termasuk pelatihan pemasaran digital, literasi keuangan, keamanan siber, dan kesadaran lingkungan (The Asia Foundation, 2025).	materi digital diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari, bukan diajarkan sebagai kompetensi teknologi yang abstrak.
Proses penguatan kapasitas	Perempuan n wirausaha membangun kapasitas melalui praktik berulang, demonstrasi sebaya, penjelasan berbahasa lokal, dan adaptasi terhadap jenis produk serta skala pasar.	Perempuan n wirausaha membangun kapasitas melalui kelompok sebaya tingkat barangay, pelatihan berbasis mobile, pelatih komunitas, dan mentoring berbasis kepercayaan.	Go Digital ASEAN tahap pertama melatih lebih dari 225.000 individu dari komunitas kurang terlayani, dengan 60% perempuan; tahap kedua menjangkau 215.896	Skala pelatihan penting, tetapi pemberdayaan bergantung pada apakah penguatan kapasitas tertanam secara sosial dan dipraktikkan berulang dalam komunitas.



pemilik dan pekerja UMKM (The Asia Foundation, 2025).				
Indikator perubahan perilaku dan sosial	Perubahan terlihat melalui promosi daring, penggunaan pembayaran digital, keterlibatan pelanggan, serta pencatatan usaha yang lebih tertib.	Perubahan terlihat melalui social commerce, komunikasi pelanggan berbasis mobile, transaksi digital, dan keberlanjutan usaha melalui kanal digital.	Laporan dampak Go Digital ASEAN menunjukkan bahwa lima bulan setelah pelatihan, dari survei terhadap 3.372 peserta, 81% UMKM melaporkan peningkatan keterlibatan pelanggan, 77% memindahkan usaha ke kanal daring, dan 25% mempertahankan usaha karena pelatihan (ASEAN Secretariat, 2022).	Hasil terukur menunjukkan bahwa literasi digital dapat mengubah perilaku usaha, tetapi pertanyaan pemberdayaan yang lebih dalam adalah apakah perempuan memperoleh kendali berkelanjutan atas partisipasi pasar digital.
Kolaborasi	Intervensi efektif membutuhkan	Intervensi efektif membutuhkan	Kerangka digital ASEAN	Kolaborasi multi-aktor mencegah



pemangku kepentingan	pemerintah lokal, universitas, koperasi, lembaga keuangan, aktor marketplace, dan kelompok perempuan.	kepemimpinan barangay, NGO, lembaga penghidupan lokal, pelatih digital, aktor mikrofinansial, dan mentor komunitas.	menekankan adopsi layanan digital inklusif dan pengembangan keterampilan bagi UMKM, pekerja mandiri, dan pekerja gig (ASEAN Secretariat, 2021, 2026).	pelatihan menjadi kegiatan sesaat dan menghubungkan pemberdayaan digital dengan pembiayaan, pasar, regulasi, serta perlindungan sosial.
Hasil pemberdayaan komunitas	Kepercayaan diri digital meningkat, jangkauan pelanggan meluas, visibilitas usaha membaik, dan kontribusi ekonomi perempuan lebih diakui.	Keterampilan mobile commerce meningkat, kepercayaan diri berbasis sebaya menguat, adaptasi penghidupan membaik, dan dukungan komunitas terhadap perempuan wirausaha meningkat.	OECD (2025) menegaskan bahwa digitalisasi dapat memperluas akses pasar, keuangan, dan pelatihan bagi usaha perempuan di wilayah terpencil Indonesia dan Filipina.	Pemberdayaan terjadi ketika keterampilan digital menjadi sumber agensi, bukan sekadar indikator keikutsertaan program.
Implikasi keberlanjutan	Keberlanjutan bergantung pada mentoring lanjutan, layanan digital berbasis koperasi, branding produk	Keberlanjutan bergantung pada mentoring tingkat barangay, ruang digital aman, keberlanjutan	World Bank (2024) memperingatkan bahwa kemajuan	Pengabdian masyarakat berkelanjutan membutuhkan pendampingan kelembagaan jangka



		lokal, literasi keuangan, dan kontinuitas akses pasar.	usaha yang peka bencana, dan akses keuangan yang mudah.	digital dapat memperdal am kesenjangan pembangunan an apabila biaya, kualitas akses, dan keterampilan tetap tidak merata.	panjang, bukan hanya keluaran pelatihan jangka pendek.
Relevansi bagi Asia Tenggara		Indonesia menunjukkan tantangan memperluas pemberdayaan pada populasi UMKM yang sangat besar dan ekonomi lokal yang beragam.	Filipina menunjukkan pentingnya jejaring komunitas, penghidupan mobile-first, dan ketahanan lokal.	Agen digital dan sosial-budaya ASEAN menempatkan transformasi digital inklusif sebagai bagian dari pembangunan berpusat pada manusia (ASEAN Secretariat, 2025, 2026).	Program pengabdian masyarakat Asia Tenggara perlu mengintegrasikan keterampilan digital, dukungan sensitif gender, literasi keuangan, keamanan daring, dan ekosistem kelembagaan lokal.

Matriks komparatif di atas menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar apakah program literasi digital mampu menjangkau UMKM perempuan, melainkan apakah jangkauan tersebut dapat diubah menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan. Jangkauan pelatihan tetap penting karena ketimpangan digital masih nyata dan banyak perempuan wirausaha di wilayah perdesaan belum memperoleh pendidikan bisnis formal. Namun, jangkauan saja belum menjawab apakah perempuan pelaku UMKM memperoleh kepercayaan diri, kendali ekonomi, daya tawar, keamanan digital, serta dukungan kelembagaan setelah pelatihan selesai. Oleh karena itu, tabel tersebut membedakan antara keluaran teknis dan hasil pemberdayaan. Keluaran teknis



mencakup jumlah peserta, modul yang disampaikan, akun digital yang dibuat, atau sertifikat pelatihan. Hasil pemberdayaan mencakup peningkatan keterlibatan pelanggan, kepercayaan diri digital, pencatatan keuangan, kemampuan menghindari risiko daring, pembelajaran sebaya, dan keberlanjutan usaha.

Perbandingan Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa pemberdayaan digital sangat dipengaruhi oleh ekologi kelembagaan lokal. Di Indonesia, skala UMKM yang sangat besar menjadikan literasi digital sebagai prioritas ekonomi nasional, tetapi keragaman wilayah, jenis produk, kapasitas desa, dan akses pasar membuat pelatihan seragam tidak memadai. Program pengabdian masyarakat perlu bekerja melalui fasilitator lokal, koperasi, kelompok perempuan, lembaga desa, perguruan tinggi, dan dinas UMKM. Di Filipina, jejaring barangay menyediakan infrastruktur sosial yang kuat untuk membangun kepercayaan dan mobilisasi peserta, tetapi kerentanan penghidupan akibat bencana, migrasi, dan ketidakpastian pendapatan membuat literasi digital harus dikaitkan dengan strategi ketahanan rumah tangga. Dalam kedua kasus, bukti menunjukkan bahwa intervensi partisipatif paling kuat ketika masyarakat tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga menjadi penafsir kebutuhan, perancang isi pelatihan, mentor sebaya, dan evaluator hasil.

1. Kerentanan Komunitas dan Karakter Gender dalam Eksklusi Digital

Temuan pertama menunjukkan bahwa eksklusi digital pada UMKM perempuan bukan hanya persoalan akses internet, melainkan kondisi berlapis yang dibentuk oleh gender, geografi, informalitas, ketidakpastian pendapatan, dan jarak kelembagaan. Di perdesaan Indonesia, perempuan pelaku UMKM sering menjalankan usaha berbasis rumah tangga, pasar lokal, produksi komunitas, atau kelompok usaha kecil. Jenis usahanya dapat berupa makanan olahan, kerajinan, produk pertanian, ritel kecil, atau jasa rumahan. Nilai ekonomi usaha ini besar karena UMKM merupakan tulang punggung penyerapan kerja dan kontribusi ekonomi nasional, tetapi banyak di antaranya masih informal, kurang terdokumentasi, dan belum terhubung secara kuat dengan pasar digital (Coordinating Ministry for Economic Affairs of Indonesia, 2022; ADB, 2024).

Dalam konteks tersebut, eksklusi digital tidak hanya berarti ketidakmampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga ketidakpastian mengenai harga, foto produk, komunikasi pelanggan, ongkos pengiriman, risiko penipuan, legalitas usaha, pembayaran digital, dan pengelolaan reputasi. Perempuan pelaku UMKM dapat memiliki smartphone, tetapi belum tentu memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan perangkat tersebut sebagai alat usaha. Mereka dapat memiliki akses internet, tetapi belum tentu memahami cara membedakan pesan pelanggan yang aman dan berisiko. Mereka dapat mengikuti pelatihan, tetapi belum tentu memiliki dukungan keluarga, waktu, atau jejaring pasar untuk menerapkan pengetahuan tersebut.

Di perdesaan Filipina, UMKM perempuan menghadapi kendala serupa dengan konteks komunitas yang berbeda. Barangay sebagai satuan sosial lokal memiliki peran



penting dalam membangun kepercayaan, mobilisasi warga, dan penyelenggaraan kegiatan komunitas. Namun, perempuan pelaku usaha mikro juga menghadapi jarak pasar, keterbatasan modal kerja, kerentanan bencana, serta ketergantungan pada praktik komunikasi mobile-first. Filipina memiliki basis UMKM yang sangat besar, tetapi banyak usaha mikro tetap rentan terhadap guncangan ekonomi dan keterbatasan akses pembiayaan formal (Bangko Sentral ng Pilipinas, 2025; Department of Trade and Industry, 2024). Oleh karena itu, literasi digital di Filipina perlu dikaitkan dengan keberlanjutan penghidupan, bukan hanya keterampilan promosi daring.

Temuan partisipatif menunjukkan bahwa kerentanan menjadi lebih jelas ketika perempuan pelaku UMKM diberi ruang untuk mendefinisikan hambatan mereka sendiri. Penyedia pelatihan sering mendiagnosis masalah sebagai “rendahnya keterampilan digital”. Namun, masyarakat mengalami persoalan tersebut dalam bentuk yang jauh lebih konkret: bagaimana memfoto produk dengan ponsel sederhana, bagaimana menjawab pelanggan tanpa tertipu, bagaimana menghitung ongkos kirim, bagaimana memisahkan uang usaha dan uang rumah tangga, bagaimana menghindari pinjaman daring ilegal, bagaimana menggunakan pembayaran digital secara aman, dan bagaimana mempromosikan produk tanpa merasa melanggar norma lokal. Hal ini sesuai dengan Freire (1970), yang menekankan bahwa pemberdayaan dimulai ketika masyarakat mampu menamai kondisi yang membatasi kehidupannya.

Perbandingan Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa norma sosial dan kepercayaan kelembagaan memengaruhi adopsi digital secara berbeda. Di Indonesia, perempuan pelaku UMKM dapat memperoleh legitimasi sosial melalui kelompok perempuan, koperasi, pengajian, organisasi desa, program pemerintah daerah, dan kegiatan pengabdian masyarakat universitas. Jejaring tersebut membantu mengurangi rasa cemas terhadap teknologi karena pelatihan diterima sebagai kegiatan sosial yang sah. Di Filipina, barangay dan jejaring komunitas memainkan peran serupa, tetapi kuatnya praktik social commerce berbasis mobile membuat pelatihan perlu dimulai dari platform yang sudah akrab sebelum memperkenalkan perangkat bisnis digital yang lebih kompleks. Implikasi praktisnya adalah program pengabdian masyarakat tidak boleh dimulai dari teknologi, melainkan dari kehidupan sosial dan ekonomi pelaku usaha.

Temuan ini menantang pendekatan digital inclusion yang terlalu teknosentris. Bukti komparatif lebih mendukung pendekatan kapabilitas dan pemberdayaan. Sen (1999) menegaskan bahwa sumber daya baru bermakna apabila masyarakat memiliki kebebasan nyata untuk mengubahnya menjadi capaian yang mereka nilai penting. Kabeer (1999) juga menekankan bahwa agensi bergantung pada hubungan antara sumber daya dan capaian. Dalam konteks UMKM perempuan, smartphone adalah sumber daya, akun marketplace adalah sumber daya, dan pelatihan adalah sumber daya. Namun, ketiganya tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan apabila perempuan tidak dapat menggunakannya untuk memperluas pasar, mengelola risiko, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi tawar ekonomi.



2. Desain Intervensi Partisipatif: Dari Pelatihan Teknis ke Pembelajaran Berbasis Penghidupan

Temuan kedua menunjukkan bahwa desain intervensi partisipatif menentukan apakah literasi digital menjadi bermakna bagi UMKM perempuan. Di Indonesia dan Filipina, model intervensi yang paling relevan bukanlah seminar umum tentang transformasi digital, melainkan proses pembelajaran berbasis penghidupan yang disusun dari praktik usaha sehari-hari peserta. Materi yang relevan mencakup promosi produk, komunikasi pelanggan, pencatatan keuangan digital, keamanan pembayaran mobile, perencanaan keuangan sederhana, navigasi marketplace, dan pengelolaan reputasi daring. Go Digital ASEAN memberikan bukti regional bahwa pelatihan keterampilan digital berskala besar dapat menghasilkan dampak ketika menyasar komunitas kurang terlayani dan UMKM, termasuk perempuan wirausaha (ASEAN Secretariat, 2022; The Asia Foundation, 2025).

Dalam kasus Indonesia, desain intervensi perlu memperhatikan keragaman produk, pasar lokal, dan kelembagaan desa. Bagi kelompok usaha makanan olahan, literasi digital dapat mencakup foto kemasan, informasi kedaluwarsa, narasi halal, testimoni pelanggan, koordinasi pengiriman, dan rekonsiliasi pembayaran. Bagi kelompok kerajinan, literasi digital dapat mencakup cerita produk, identitas budaya, katalog digital, dan komunikasi dengan pembeli. Bagi usaha ritel kecil, literasi digital dapat mencakup stok barang, pemesanan melalui WhatsApp Business, pembayaran digital, dan retensi pelanggan. Proses pemberdayaan menjadi kuat ketika pelatihan tidak memaksa peserta menyesuaikan diri dengan kurikulum eksternal, melainkan menyesuaikan kurikulum dengan realitas penghidupan komunitas.

Dalam kasus Filipina, desain intervensi juga harus dimulai dari praktik usaha yang hidup dalam komunitas. Banyak usaha mikro bergantung pada ponsel, jejaring sosial, kepercayaan lingkungan, dan tenaga kerja rumah tangga yang fleksibel. Pelatihan tingkat barangay dapat dimulai dari social commerce, pengelolaan pesan pelanggan, poster digital sederhana, kepercayaan terhadap pembayaran mobile, dan penganggaran rumah tangga. Pada komunitas yang rentan terhadap topan, banjir, atau gangguan penghidupan, literasi digital juga perlu memasukkan unsur kesinambungan usaha: menyimpan kontak pelanggan, menggunakan kanal daring ketika pasar fisik terganggu, melakukan diversifikasi penjualan, dan menjaga catatan keuangan dasar.

Bukti komparatif memperlihatkan bahwa kedua konteks membutuhkan pergeseran dari delivery training menuju siklus pembelajaran partisipatif. Model delivery training mengasumsikan bahwa pengetahuan bergerak dari ahli kepada peserta. Sebaliknya, siklus pembelajaran partisipatif mengasumsikan bahwa pengetahuan dibangun melalui demonstrasi, praktik, umpan balik, koreksi sebaya, dan adaptasi lokal. Model kedua lebih sesuai dengan teori pemberdayaan karena mengakui perempuan pelaku UMKM sebagai penafsir aktif teknologi. Fasilitator dapat mengajarkan fotografi produk, tetapi peserta yang menentukan sudut foto mana yang



mencerminkan kualitas, kesederhanaan, identitas lokal, dan kepercayaan. Fasilitator dapat memperkenalkan pembayaran digital, tetapi peserta yang menentukan bagaimana menjelaskannya kepada pelanggan yang lebih tua atau kurang terbiasa.

Temuan ini sejalan dengan asset-based community development, yang menyatakan bahwa intervensi harus dimulai dari aset yang sudah dimiliki komunitas, bukan hanya dari kekurangan (Kretzmann & McKnight, 1993). UMKM perempuan telah memiliki pengetahuan produk, hubungan pelanggan, pengalaman mengelola uang rumah tangga, jaringan kepercayaan, praktik simpanan informal, dan strategi adaptasi penghidupan. Literasi digital dan keuangan menjadi memberdayakan ketika memperkuat aset tersebut. Di Indonesia, identitas produk lokal dan jaringan koperasi dapat menjadi aset untuk branding digital. Di Filipina, jejaring barangay dan praktik komunikasi mobile dapat menjadi aset untuk social commerce. Tugas pengabdian masyarakat adalah menghubungkan aset lokal dengan kapabilitas baru.

Secara praktis, program pengabdian masyarakat sebaiknya mencakup lima tahap intervensi. Tahap pertama adalah diagnosis partisipatif, yaitu ketika perempuan pelaku UMKM mengidentifikasi hambatan usaha dan kecemasan digital mereka. Tahap kedua adalah pelatihan kontekstual yang menghubungkan keterampilan digital dan keuangan dengan produk serta transaksi nyata. Tahap ketiga adalah mentoring sebaya, ketika peserta belajar dari perempuan lain yang telah berhasil mengadopsi praktik digital. Tahap keempat adalah linkage kelembagaan, yaitu penghubungan peserta dengan pemerintah lokal, lembaga keuangan, universitas, dan platform digital. Tahap kelima adalah evaluasi partisipatif, ketika komunitas sendiri menilai apakah program meningkatkan kepercayaan diri, keberlanjutan usaha, keterlibatan pelanggan, dan pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga.

3. Hasil Terukur: Keterlibatan Pelanggan, Migrasi Daring, Kepercayaan Diri, dan Keberlanjutan Usaha

Temuan ketiga menunjukkan bahwa hasil terukur harus ditafsirkan lebih dalam daripada sekadar angka keberhasilan program. Laporan dampak Go Digital ASEAN mencatat bahwa lima bulan setelah pelatihan, survei terhadap 3.372 peserta menunjukkan bahwa di antara UMKM yang disurvei, 81 persen melaporkan peningkatan keterlibatan pelanggan, 77 persen memindahkan usaha ke kanal daring, dan 25 persen mampu mempertahankan usaha karena pelatihan (ASEAN Secretariat, 2022). Indikator ini penting karena menunjukkan bahwa literasi digital dapat menghasilkan perubahan perilaku, bukan hanya peningkatan kesadaran. Keterlibatan pelanggan menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi. Migrasi daring menunjukkan keberanian menggunakan kanal digital untuk usaha. Keberlanjutan usaha menunjukkan kapasitas bertahan dalam tekanan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, hasil tersebut perlu dibaca melalui skala dan keragaman ekosistem UMKM. Peningkatan keterlibatan pelanggan dapat berarti kemampuan merespons pembeli di luar lingkungan terdekat, menggunakan foto dan



keterangan produk secara lebih efektif, menyimpan kontak pelanggan, atau mempromosikan produk pada musim permintaan tertentu. Migrasi daring tidak selalu berarti masuk ke marketplace besar; dapat dimulai dari WhatsApp Business, Instagram, Facebook Marketplace, katalog digital lokal, atau grup komunitas. Keberlanjutan usaha dapat berarti kemampuan mempertahankan penjualan ketika pasar fisik menurun, mobilitas keluarga terbatas, atau permintaan lokal berubah. Oleh karena itu, pengukuran perlu mengenali berbagai tingkat adopsi digital, bukan hanya pendaftaran pada platform formal.

Dalam konteks Filipina, keterlibatan pelanggan sangat terkait dengan komunikasi mobile dan jejaring sosial barangay. Migrasi daring dapat terjadi melalui social commerce sebelum masuk ke e-commerce formal. Keberlanjutan usaha menjadi sangat penting pada komunitas yang menghadapi risiko bencana, fluktuasi remitansi, atau pendapatan musiman. Perangkat digital dapat membantu perempuan mempertahankan hubungan pelanggan, mengoordinasikan pengiriman, menerima pembayaran, dan melakukan diversifikasi kanal penjualan. Namun, hasil terukur juga harus mencakup apakah perempuan merasa aman secara daring, mampu mengelola batas komunikasi pelanggan, mempercayai pembayaran digital, dan tidak mengalami tekanan rumah tangga yang lebih besar akibat aktivitas usaha daring.

Perbandingan ini menunjukkan pentingnya hasil antara atau intermediate outcomes. Evaluasi program pengabdian masyarakat sering mengejar hasil akhir seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, atau pertumbuhan usaha. Hasil tersebut penting, tetapi sulit diatribusikan tanpa data longitudinal. Hasil antara seperti kepercayaan diri, keterlibatan pelanggan, migrasi daring, pencatatan usaha, mentoring sebaya, dan perilaku aman digital lebih dekat dengan siklus pengabdian masyarakat dan lebih mungkin diukur secara partisipatif. Secara teoritis, hasil antara juga penting karena menunjukkan perubahan agensi. Kabeer (1999) menegaskan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan membuat pilihan strategis dalam konteks ketika kemampuan itu sebelumnya terbatas.

Temuan ini juga merespons kelemahan dalam banyak evaluasi pelatihan. Banyak program hanya melaporkan jumlah peserta, jumlah modul, atau jumlah sertifikat. Indikator tersebut mengukur penyelenggaraan kegiatan, bukan pemberdayaan. Kerangka evaluasi yang lebih kuat perlu membedakan output, outcome, dan empowerment. Output adalah kegiatan yang dilakukan. Outcome adalah perubahan perilaku. Empowerment adalah penguatan agensi, kapasitas kolektif, dan kendali berkelanjutan atas keputusan penghidupan. Indikator Go Digital ASEAN penting karena telah bergerak melampaui kehadiran peserta menuju perubahan perilaku, tetapi program masa depan perlu mengembangkan data yang lebih terpilah menurut gender, lokasi, usia, sektor usaha, disabilitas, dan bentuk dukungan pascapelatihan.

Secara praktis, alat ukur program sebaiknya mencakup indikator yang dirancang bersama komunitas. Peserta dapat mendefinisikan keberhasilan sebagai memperoleh



pelanggan berulang, memisahkan uang usaha dan rumah tangga, menghindari penipuan daring, membantu perempuan lain membuat katalog produk, atau lebih percaya diri bernegosiasi dengan pemasok. Indikator tersebut mungkin tampak sederhana dibandingkan metrik pertumbuhan usaha formal, tetapi justru menangkap proses sosial pemberdayaan. Program pengabdian masyarakat di Asia Tenggara perlu menggabungkan indikator kuantitatif dengan participatory outcome mapping agar perubahan yang diukur tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, psikologis, dan kelembagaan.

4. Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Keberlanjutan Kelembagaan

Temuan keempat menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan digital bergantung pada kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Tidak ada satu aktor tunggal yang dapat mengatasi seluruh hambatan UMKM perempuan. Universitas dapat menyediakan keahlian pengabdian masyarakat, fasilitator mahasiswa, instrumen evaluasi, dan pembelajaran reflektif. Pemerintah lokal dapat memberikan legitimasi, mobilisasi peserta, integrasi kebijakan, dan dukungan program UMKM. Organisasi nonpemerintah dapat memberikan pengorganisasian komunitas, fasilitasi sensitif gender, dan kepercayaan sosial. Lembaga keuangan dapat memberikan literasi pembayaran digital, tabungan, dan pembiayaan bertanggung jawab. Platform digital dapat membantu onboarding, keamanan transaksi, dan pengelolaan toko daring. Kelompok perempuan dan koperasi dapat memberikan mentoring sebaya, kesinambungan, dan akuntabilitas lokal.

Di Indonesia, kolaborasi pemangku kepentingan sangat penting karena skala UMKM sangat besar. Agenda pemberdayaan digital nasional tidak dapat hanya bergantung pada pelatihan terpusat. Program harus dilokalkan melalui pemerintah kabupaten/kota, desa, perguruan tinggi, koperasi, organisasi perempuan, komunitas keagamaan, dan asosiasi UMKM. ASEAN Digital Masterplan menegaskan pentingnya adopsi layanan digital oleh masyarakat dan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk membuka produktivitas dan pertumbuhan (ASEAN Secretariat, 2021). ASEAN Digital Masterplan 2030 juga menekankan pelatihan reskilling dan upskilling yang inklusif bagi UMKM, pekerja mandiri, dan pekerja gig (ASEAN Secretariat, 2026). Kerangka ini mendukung gagasan bahwa program pengabdian masyarakat perlu terhubung dengan sistem kelembagaan yang lebih luas.

Di Filipina, kolaborasi perlu memperhatikan tata kelola lokal dan jejaring komunitas. Kepemimpinan barangay dapat memobilisasi peserta dan menyediakan ruang pelatihan, tetapi pendampingan teknis dan finansial membutuhkan dukungan lembaga penghidupan, NGO, mikrofinansial, universitas, serta penyedia layanan digital. Karena banyak UMKM perempuan bergerak secara informal, dukungan awal sebaiknya tidak langsung dibebani persyaratan formalitas yang kompleks. Program perlu menyediakan jalur bertahap: kepercayaan diri digital dasar, pencatatan sederhana,



pengelolaan pelanggan, pemahaman legalitas, dan literasi pembiayaan bertanggung jawab. Pendekatan bertahap ini lebih realistis bagi usaha mikro.

Bukti komparatif menunjukkan kekuatan yang berbeda. Kekuatan Indonesia terletak pada potensi skala, jaringan pemerintah daerah, dan tradisi pengabdian masyarakat perguruan tinggi. Kelemahannya adalah risiko fragmentasi, kualitas pelatihan yang tidak merata, serta kecenderungan program berbasis output. Kekuatan Filipina terletak pada jejaring komunitas lokal, praktik social commerce berbasis mobile, dan kedekatan barangay dengan warga. Kelemahannya adalah kerentanan infrastruktur, risiko bencana, dan akses mentoring yang tidak selalu berkelanjutan. Kedua kasus menunjukkan bahwa kolaborasi perlu diikat oleh teori perubahan yang sama agar aktor tidak bekerja secara terpisah.

Temuan ini sejalan dengan teori collaborative governance, yang menekankan kepercayaan, pemahaman bersama, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pengabdian masyarakat, tata kelola kolaboratif bukan hanya konsep administrasi publik, melainkan syarat praktis keberlanjutan. Pelatihan literasi digital dapat meningkatkan kesadaran, tetapi kolaborasi kelembagaan menentukan apakah peserta dapat mengakses pembiayaan, memperbaiki kemasan, memasuki pasar, menyelesaikan masalah platform, dan menerima pendampingan lanjutan.

Keberlanjutan intervensi bergantung pada tiga bentuk kesinambungan. Pertama, kesinambungan pedagogis, yaitu praktik berulang, mentoring, dan pelatihan lanjutan. Kedua, kesinambungan kelembagaan, yaitu dukungan aktor lokal setelah program awal selesai. Ketiga, kesinambungan ekonomi, yaitu manfaat nyata dari adopsi digital bagi usaha, baik melalui pelanggan baru, efisiensi biaya, akses pasar, maupun ketahanan pendapatan. Jika salah satu unsur ini tidak hadir, pemberdayaan melemah. Perempuan dapat belajar pemasaran digital, tetapi berhenti menggunakannya apabila tidak ada bantuan ketika menghadapi masalah. Mereka dapat mengadopsi pembayaran digital, tetapi kembali ke pembayaran tunai apabila pelanggan tidak percaya. Mereka dapat membuat toko daring, tetapi tidak memperoleh keuntungan apabila ongkos logistik terlalu tinggi.

Secara praktis, program pengabdian masyarakat perlu membangun simpul pemberdayaan digital lokal. Simpul tersebut dapat berupa kelompok sebaya perempuan wirausaha, klinik digital koperasi, pojok digital barangay, pusat mentoring universitas, atau lingkaran belajar usaha desa. Simpul tersebut membuat pembelajaran tidak bergantung sepenuhnya pada pelatih eksternal. Peserta yang lebih maju dapat menjadi mentor bagi peserta lain. Di sinilah pemberdayaan menjadi kolektif, bukan hanya individual.

5. Keamanan Daring, Literasi Keuangan, dan Etika Pemberdayaan Digital

Temuan kelima menunjukkan bahwa pemberdayaan digital harus selalu memasukkan keamanan daring dan literasi keuangan. Program yang mengajarkan



perempuan memasuki pasar digital tanpa membekali mereka dengan pemahaman tentang penipuan, pelecehan daring, penyalahgunaan data, utang digital, dan ketergantungan platform justru dapat meningkatkan kerentanan. World Bank (2024) menegaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya mencakup akses, tetapi juga kualitas, keterjangkauan, dan kemampuan menggunakan teknologi secara produktif serta aman. Bagi perempuan wirausaha, keamanan daring sangat penting karena visibilitas publik di ruang digital dapat membuka peluang sekaligus risiko sosial.

Di Indonesia, pelatihan keamanan daring perlu mencakup pengenalan modus penipuan, keamanan kata sandi, verifikasi transaksi, batas komunikasi pelanggan, dan kewaspadaan terhadap pinjaman ilegal. Literasi keuangan perlu mencakup pemisahan uang rumah tangga dan usaha, perhitungan laba, pengelolaan arus kas, evaluasi tawaran kredit, dan pemahaman biaya pembayaran digital. Di Filipina, materi serupa perlu dikaitkan dengan praktik *mobile-first*, keuangan rumah tangga berbasis remitansi, tabungan darurat, dan hubungan pelanggan berbasis kepercayaan. Kedua konteks membutuhkan pendekatan sensitif gender yang mengakui peran ekonomi perempuan sekaligus risiko yang mereka hadapi.

Bukti intervensi partisipatif menunjukkan bahwa pesan keamanan digital lebih mudah dipahami ketika dikaitkan dengan pengalaman nyata. Peringatan abstrak tentang keamanan siber sering tidak cukup efektif. Latihan seperti mengenali pesan mencurigakan, membandingkan bukti transfer, mendiskusikan skenario pelecehan pelanggan, dan menghitung kewajiban pinjaman jauh lebih memberdayakan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa, yang menekankan keterkaitan antara pengetahuan, pengalaman hidup, dan kebutuhan langsung (Knowles et al., 2015). Secara pedagogis, pendekatan ini juga sejalan dengan Freire (1970) karena peserta tidak hanya menerima instruksi, tetapi menganalisis risiko digital secara kritis.

Literasi keuangan sama pentingnya. Akses pasar digital dapat meningkatkan penjualan, tetapi tanpa kapasitas keuangan, perempuan dapat kesulitan menilai apakah penjualan daring benar-benar menguntungkan. Ongkos kirim, biaya platform, diskon promosi, biaya kemasan, keterlambatan pembayaran, dan biaya transaksi dapat mengurangi margin. Perempuan dapat mengalami peningkatan volume penjualan tanpa peningkatan pendapatan bersih. Karena itu, program pengabdian masyarakat perlu mengajarkan alat keuangan sederhana namun bermakna: buku kas harian, perhitungan biaya, penentuan harga, margin laba, tabungan darurat, dan pinjaman bertanggung jawab.

Kajian mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan menegaskan bahwa akses terhadap pasar dan keuangan harus disertai kendali atas sumber daya serta pengambilan keputusan (Kabeer, 1999; UN Women, 2023). Seorang perempuan dapat menerima pembayaran digital, tetapi apabila akun dikendalikan anggota keluarga lain, pemberdayaannya terbatas. Ia dapat memperoleh kredit, tetapi apabila tekanan cicilan meningkatkan beban rumah tangga, pemberdayaan menjadi ambigu. Ia dapat



memperluas visibilitas daring, tetapi apabila pelecehan membuatnya mundur, inklusi digital berubah menjadi risiko sosial. Karena itu, etika pemberdayaan digital mengharuskan perhatian terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan.

Implikasi praktisnya adalah program pengabdian masyarakat perlu mengadopsi prinsip adopsi digital yang aman. Adopsi aman berarti teknologi diperkenalkan secara bertahap dengan memperhatikan risiko, persetujuan, pemahaman, kontrol, dan kenyamanan peserta. Peserta tidak boleh didorong masuk ke platform yang melebihi kapasitas atau membuka risiko yang belum dapat mereka kelola. Mereka perlu didukung untuk memilih jalur digital yang sesuai dengan ukuran usaha, jenis produk, basis pelanggan, dan kondisi personal. Dalam beberapa kasus, WhatsApp Business dan pencatatan sederhana lebih tepat dibandingkan onboarding langsung ke marketplace besar. Dalam kasus lain, marketplace dapat bermanfaat apabila tersedia mentoring dan dukungan logistik.

Artikel ini berkontribusi pada kajian pengabdian masyarakat dengan menegaskan bahwa pemberdayaan digital harus dievaluasi secara etis, bukan hanya ekonomis. Program tidak dapat disebut berhasil hanya karena peserta masuk ke kanal daring. Program berhasil ketika peserta dapat menggunakan teknologi secara aman, percaya diri, menguntungkan, dan berkelanjutan. Karena itu, kerangka evaluasi perlu mencakup keamanan digital, agensi keuangan, kepercayaan diri psikososial, dan dukungan komunitas.

Proposisi Pengabdian Masyarakat

Proposisi 1: Partisipasi komunitas memperkuat relevansi dan penerimaan program literasi digital-keuangan ketika peserta ikut mendefinisikan masalah penghidupan, prioritas pelatihan, dan indikator keberhasilan.

Proposisi ini muncul dari temuan bahwa UMKM perempuan mengalami eksklusi digital sebagai kendala penghidupan yang konkret, bukan sekadar kekurangan keterampilan. Partisipasi memungkinkan program mengidentifikasi hambatan yang nyata: waktu domestik, jenis produk, kepercayaan pelanggan, kecemasan platform, risiko pembayaran, keamanan daring, dan kemandirian keuangan. Ketika perempuan pelaku UMKM turut menentukan isi program, pelatihan menjadi lebih relevan dan sah secara sosial.

Proposisi 2: Penguatan kapasitas memediasi hubungan antara akses digital dan pemberdayaan berkelanjutan.

Akses terhadap smartphone, platform, atau pembayaran digital tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan. Penguatan kapasitas mengubah akses menjadi kapabilitas melalui praktik berulang, mentoring sebaya, pembelajaran kontekstual, dan dukungan kelembagaan. Di Indonesia dan Filipina, UMKM perempuan memperoleh manfaat ketika keterampilan digital dikaitkan dengan pemasaran produk, komunikasi pelanggan, pencatatan keuangan, keamanan pembayaran, dan pengambilan keputusan usaha.



Proposisi 3: Kolaborasi multi-pemangku kepentingan meningkatkan keberlanjutan hasil pengabdian masyarakat dengan menghubungkan pelatihan dengan pembiayaan, pasar, kebijakan, dan sistem dukungan lokal.

Literasi digital-keuangan tidak dapat dipertahankan oleh pelatih saja. Universitas, pemerintah lokal, NGO, lembaga keuangan, platform digital, koperasi, kelompok perempuan, dan pemimpin komunitas memiliki sumber daya yang berbeda. Kolaborasi menjadi berkelanjutan ketika para aktor berbagi teori perubahan dan menyediakan pendampingan pascapelatihan.

Proposisi 4: Adopsi digital yang aman merupakan syarat etis bagi pemberdayaan ekonomi perempuan dalam program pengabdian masyarakat di Asia Tenggara.

Pemberdayaan digital tidak boleh memperbesar risiko perempuan wirausaha. Penipuan daring, pelecehan, penyalahgunaan data, ketergantungan platform, dan kredit tidak bertanggung jawab dapat melemahkan hasil pemberdayaan. Adopsi aman berarti teknologi diperkenalkan dengan memperhatikan literasi risiko, persetujuan, kendali, batas komunikasi, dan pengambilan keputusan keuangan.

Keempat proposisi tersebut membentuk logika konseptual sebagai berikut: **kerentanan komunitas → diagnosis partisipatif → penguatan kapasitas kontekstual → adopsi digital aman → perubahan perilaku → agensi kolektif → ketahanan penghidupan berkelanjutan**. Kerangka ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hasil tunggal dari pelatihan, melainkan proses kumulatif yang membutuhkan kepercayaan sosial, kapasitas praktis, dukungan kelembagaan, dan perlindungan etis.

Kesimpulan

Artikel ini mengevaluasi secara komparatif bagaimana intervensi literasi digital dan keuangan partisipatif dapat memperkuat pemberdayaan, partisipasi pasar, dan ketahanan penghidupan UMKM perempuan di perdesaan Indonesia dan Filipina. Jawaban utama artikel ini adalah bahwa literasi digital-keuangan memberikan dampak sosial yang kuat ketika dilekatkan pada proses komunitas partisipatif, fasilitasi sensitif gender, kebutuhan penghidupan praktis, pembelajaran sebaya, keamanan daring, dan kolaborasi kelembagaan berkelanjutan. Kasus Indonesia menunjukkan pentingnya perluasan skala pemberdayaan melalui lembaga desa, koperasi, perguruan tinggi, kelompok perempuan, dan ekosistem UMKM lokal. Kasus Filipina menunjukkan pentingnya jejaring barangay, pembelajaran mobile-first, kesinambungan penghidupan, dan mentoring berbasis komunitas.

Temuan utama artikel ini adalah bahwa UMKM perempuan membutuhkan jalur pemberdayaan yang menghubungkan diagnosis masalah komunitas dengan intervensi yang kontekstual. Eksklusi digital bukan hanya rendahnya keterampilan, tetapi dibentuk oleh norma gender, tanggung jawab domestik, jarak pasar, ketidakpastian keuangan, risiko daring, dan fragmentasi kelembagaan. Intervensi partisipatif membantu mengungkap hambatan tersebut dan menjadikan pelatihan lebih relevan. Penguatan kapasitas meningkatkan kepercayaan diri digital, keterlibatan pelanggan, disiplin keuangan, dan keberlanjutan usaha. Kolaborasi pemangku kepentingan mendukung



keberlanjutan dengan menghubungkan pelatihan dengan pembiayaan, pasar, kebijakan, dan mentoring lokal. Keamanan daring dan literasi keuangan melindungi perempuan dari risiko baru yang muncul dalam ekonomi digital.

Kontribusi teoritis artikel ini adalah pengembangan pendekatan pemberdayaan digital berbasis agensi dalam kajian pengabdian masyarakat. Kerangka inklusi digital sering menekankan akses, adopsi, dan jangkauan pelatihan. Artikel ini menegaskan bahwa pemberdayaan harus dievaluasi melalui agensi, keamanan, perubahan perilaku, kapasitas kolektif, dan ketahanan penghidupan. Dengan mengintegrasikan pemikiran Freire, pendekatan kapabilitas Sen, teori pemberdayaan Kabeer, asset-based community development, dan collaborative governance, artikel ini menawarkan kerangka multidimensional untuk menganalisis program pengabdian masyarakat di Asia Tenggara.

Kontribusi empiris artikel ini terletak pada interpretasi komparatif Indonesia dan Filipina sebagai dua konteks utama UMKM di Asia Tenggara. Keduanya menunjukkan bahwa perempuan wirausaha memiliki kontribusi ekonomi yang besar, tetapi masih menghadapi dukungan digital dan keuangan yang tidak merata. Indikator seperti keterlibatan pelanggan, migrasi daring, jangkauan pelatihan, dan keberlanjutan usaha penting untuk diukur, tetapi harus dibaca bersama kepercayaan diri, keamanan digital, dukungan sebaya, dan pendampingan kelembagaan.

Implikasi kebijakan dan kelembagaan dari artikel ini cukup jelas. Pemerintah perlu mengintegrasikan literasi digital dengan pengembangan UMKM, pembiayaan sensitif gender, ekosistem produk lokal, dan perencanaan ketahanan komunitas. Perguruan tinggi perlu merancang pengabdian masyarakat sebagai kemitraan jangka panjang, bukan kegiatan pelatihan sesaat. NGO dan organisasi komunitas perlu memperkuat pembelajaran sebaya dan memastikan perempuan pelaku UMKM berpengaruh terhadap prioritas program. Lembaga keuangan dan platform digital perlu menyediakan layanan yang aman, mudah diakses, dan sesuai skala usaha mikro. Pada tingkat ASEAN, kerangka transformasi digital inklusif perlu disertai pengukuran dampak yang lebih terpilah agar pembangunan digital benar-benar dapat dinilai dari perspektif komunitas marginal.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena menggunakan bukti sekunder dan tidak mengklaim temuan survei rumah tangga, kutipan wawancara, atau estimasi dampak eksperimental yang dikumpulkan langsung. Laporan publik yang tersedia sering memberikan indikator regional atau programatik tanpa disagregasi yang memadai berdasarkan gender, lokasi, usia, sektor usaha, disabilitas, dan dukungan pascapelatihan. Penelitian berikutnya perlu melakukan studi longitudinal partisipatif yang melacak UMKM perempuan sebelum, selama, dan setelah intervensi melalui survei, wawancara, catatan usaha, data perilaku digital, dan indikator pemberdayaan yang didefinisikan komunitas.

Bagi Asia Tenggara, implikasi keberlanjutan dari kajian ini sangat penting. Transformasi digital tidak otomatis menghasilkan pembangunan inklusif. Digitalisasi dapat memperdalam ketimpangan apabila masyarakat tidak memiliki keterampilan, keamanan, akses keuangan, dan dukungan kelembagaan. Namun, jika dirancang secara



partisipatif, literasi digital-keuangan dapat memperkuat agensi ekonomi perempuan, ketahanan komunitas, dan penghidupan berkelanjutan. Masa depan pengabdian masyarakat di Asia Tenggara perlu bergerak melampaui penyelenggaraan pelatihan menuju sistem pemberdayaan partisipatif yang memungkinkan komunitas belajar, beradaptasi, berkolaborasi, dan membentuk arah pembangunannya sendiri.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan konseptual, kelembagaan, dan praktis dalam pengembangan kajian pengabdian masyarakat ini. Apresiasi diberikan kepada komunitas pelaku UMKM perempuan di wilayah perdesaan Indonesia dan Filipina yang menjadi dasar refleksi analitis dalam artikel ini, khususnya atas kontribusi mereka dalam memperlihatkan pentingnya literasi digital, literasi keuangan, pembelajaran sebaya, dan penguatan kapasitas komunitas dalam membangun ketahanan penghidupan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada lembaga-lembaga pembangunan regional dan internasional, termasuk ASEAN, OECD, ADB, World Bank, UNESCO, UNDP, The Asia Foundation, serta berbagai institusi terkait yang telah menyediakan laporan, data, dan kajian yang relevan bagi penguatan analisis artikel ini. Dukungan pengetahuan dari berbagai sumber tersebut berperan penting dalam memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan peluang pemberdayaan UMKM perempuan di Asia Tenggara.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para akademisi, praktisi pengabdian masyarakat, fasilitator komunitas, organisasi masyarakat sipil, pemerintah lokal, serta lembaga pendamping UMKM yang secara berkelanjutan berkontribusi dalam memperluas akses digital, memperkuat literasi keuangan, dan membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Referensi

- ADB. (2024). *Asia small and medium-sized enterprise monitor 2024: Designing an MSME ecosystem for resilient growth in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.
- Alsop, R., Bertelsen, M., & Holland, J. (2006). *Empowerment in practice: From analysis to implementation*. World Bank.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- ASEAN Foundation. (2024). *One divide or many divides? Digital literacy research report on underprivileged communities in ASEAN*. ASEAN Foundation.
- ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN digital masterplan 2025*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2022). *Go Digital ASEAN impact summary report: MSMEs and job seekers benefit from digital skills training*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2025). *The ASEAN Socio-Cultural Community Strategic Plan*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2026). *ASEAN digital masterplan 2030*. ASEAN Secretariat.



- Bangko Sentral ng Pilipinas. (2025). *MSMEs: Pillars of inclusive growth and resilience in the Philippine economy*. BSP Research Academy.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Coordinating Ministry for Economic Affairs of Indonesia. (2022). *Government continues to encourage strengthening economic foundations through digital transformation of MSMEs*. Government of Indonesia.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Department of Trade and Industry. (2024). *Micro, small and medium enterprise development plan 2023–2028*. Government of the Philippines.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the outcomes of citizen engagement. *World Development*, 40(12), 2399–2410.
- Gonzalez-Varona, J. M., Lopez-Paredes, A., Poza, D., & Acebes, F. (2024). Building and development of organizational competence for digital transformation in SMEs. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 17(1), 1–22.
- IFC. (2021). *Women and e-commerce in Southeast Asia*. International Finance Corporation.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank.
- OECD. (2025). *Women entrepreneurship in remote areas in Indonesia and the Philippines*. OECD Global Relations Policy Papers.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- The Asia Foundation. (2025). *Go Digital ASEAN 2 impact research: Regional summary report*. The Asia Foundation.
- UN Women. (2023). *Multi-country study on women-led MSMEs, digital platforms, and inclusive economic participation*. UN Women Asia and the Pacific.
- UNDP. (2024). *Making our future: New directions for human development in Asia and the Pacific*. United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- World Bank. (2024). *Digital progress and trends report 2023*. World Bank.